BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Manajemen Pembangunan

Pengertian Manajemen Pembangunan menurut (Siagian, 2005) merupakan upaya ataupun rangkaian perkembangan yang direncanakan serta upaya pergantian yang dicoba oleh sesuatu bangsa, negeri serta pemerintah secara sadar mengarah modernitas dalam konteks pembangunan bangsa. Penafsiran manajemen pembangunan bagi (Tjokroamidjojo, 1995) merupakan proses kontrol pemerintah terhadap bisnis (administrasi) buat mewujudkan perkembangan yang direncanakan mengarah suasana yang dikira lebih baik serta lebih maju dalam bermacam aspek kehidupan berbangsa. (Kato Iskandar, dkk, 2021 : 23)

Konsep manajemen pembangunan (management of development) ialah suatu perspektif serta sebutan lain dari konsep administrasi pembangunan (administration of development), sebab memandang kedudukan administrasi dalam mewujudkan pembangunan (Esman, 1991). Sebab itu pada dasarnya bisa dikatakan kalau permasalahan administrasi pembangunan merupakan pula permasalahan manajemen pembangunan.

Manajemen ini mencakup aktivitas yang dibuat untuk menggapai tujuan, dicoba oleh individu- individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik lewat tindakan- tindakan yang sudah diresmikan lebih dahulu. Perihal tersebut meliputi pengetahuan apa yang wajib mereka jalani, menetapkan metode serta menguasai dalam melaksanakannya, serta mengukur daya guna dari usaha- usaha mereka menurut George R. Terry.

George R. Terry membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan / Penggerakan) dan Controlling (Pengawasan). Ke empat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.:

a. Planning (Perencanaan)

   Perencanaan bisa berarti meliputi aksi memilah serta menghubungkan fakta- fakta serta membuat dan memakai asumsi-asumsi menimpa masa yang hendak tiba dalam perihal memvisualisasikan dan merumuskan aktivitas- aktivitas yang diusulkan yang dikira butuh buat menggapai hasil- hasil yang di idamkan. Perencanaan berarti memastikan lebih dahulu apa yang wajib dicoba serta metode pelaksanaannya.

b. Organizing (Pengorganisasian)

   Pengorganisasian yakni penentuan, pengelompokkan, serta penataan macam- macam aktivitas yang dibutuhkan buat menggapai tujuan, penempatan orang- orang(pegawai), terhadap kegiatan- kegiatan ini, penyediaan faktor- faktor physik yang sesuai untuk keperluan kerja serta penunjukkan ikatan wewenang, yang dilimpahkan terhadap tiap orang dalam hubungannya dengan penerapan tiap aktivitas yang diharapkan.

c. Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan)

   Pelaksanaan ialah membangkitkan serta memberikan dorongan seluruh anggota kelompok agar berkehendak dan berupaya dengan keras buat menggapai tujuan dengan ikhlas dan serasi dengan perencanaan serta usaha- usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

d. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan dapat juga diformulasikan selaku proses penentuan yang wajib dicapai ialah standard, apa yang lagi dicoba ialah penerapan, memperhitungkan penerapan, serta melaksanakan perbaikan-perbaikan, sehingga penerapan sesuai dengan rencana, yakni selaras dengan standard (dimensi).

George R. Terry mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

1) Menentukan standard atau dasar bagi pengawasan atau Determining the standard or basis for control
2) Dimensi Penerapan atau Measuring the performance
3) Bandingkan penerapan dengan standard serta temukan bila terdapat perbandingan Comparing performance with the standard and ascerting the difference, it any
4) Correcting the deviation by means of remedial action atau Melakukan tindakan- tindakan yang tepat jika terjadi penyimpangan

a. Adminsitrasi Publik

Administrasi ialah suatu proses pengorganisasian yang dapat melaksanakan tugas dengan baik yang didasarkan pada sumber-sumber dalam tingkat organisasi itu sendiri. proses organisasi ini dapat melakukan tiga fungsi utama yang sangat berkaitan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki resmi. Ditingkatan teratas ialah prngarahan organisasi yang berhubungan pada proses perencanaan jangka panjang yang digunakan

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada tingkat menegah, ialah fungsi manajemen organisasi yakni paling uatama yang berhubungan dengan organisasi dalam mempertahankan suatu proses pekerjaan yang akan dikakukan dengan waktu yang lama atau berlangsung lama, seperti membagikan bahan- bahan, intruksi- intruksi, sarana- sarana serta penciptaan iklim yang dibutuhkan oleh staf teknis atau yang handal dalam proses penciptaan atau produksi (hasil). Pada tingkatan terbawah ialah fungsi pengawasan yakni dengan melakukan kontak langsung dengan para pekerja yang handal dengan teknis. Fungsi pengawasan ini dapat mengarahkan para pekerja dan dapat menjalin kerjasama yang professional dan teknis yang dikaukan sesuai dengan ketetapan pada standar yang ingin dicapai.

Dalam buku Deddy Mulyadi, Menurut Chandler dan Plano (2008:3) administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Disini mereka pula menarangkan kalau administrasi public ialah seni serta ilmu(art and science) yang diperuntukan buat mengendalikan kebijakan publik buat membongkar kasus publik yang terjalin dalam sesuatu organisasi ataupun yang lainya.

Menurut para pakar, admistrasi publik merupakan sebagai berikut:

a. John M. Pfiffner : Administrasi publik merupakan penerapan kebijakan negeri yang sudah diresmikan oleh badan perwakilan politik

b. Leonard D. White : Administrasi Publik merupakan seluruh aktivitas ataupun usaha buat menggapai tujuan yang berdasar kepada kebijakan Negara.
c. E.H. Litcfiled : Administrasi Negara merupakan sesuatu riset tentang bagaimana beragam badan pemerintah diorganisir, dilengkapi tenaga, tenaganya dibiayai, digerakkan dan dipimpin.
d. Farnharm dan Horton (1993) mengemukakan pelayanan publik selaku aktivitas suatu organisasi publik/ pemerintah yang berdasarkan pada pembiayaan utamanya yakni dari pajak, tidak hanya penerimaan yang didapatkan dari wargayang telah memberikan pelayanan. Oleh sebab itu, sektor swasta atas jaminan pemerintah menuaikan system pengelolaan pada pola pelayanan yang dibentuk diatas prasarana umum.

b. Adminstrasi Pembangunan

Kata “administrasi” berasal dari bahasa Belanda, *administratie* yang berarti seluruh aktivitas yang meliputi surat-menyurat, komputerisasi, tulis-menulis, ketik mengetik, komputerisasi, kearsipan, dan penjadwalan, (pekerjaan tata usaha kantor). Kata “administrasi” juga berasal dari bahasa Yunani, *ad ministrare*. *Ad* maksudnya pada, sebaliknya ministrare maksudnya melayani, hingga kata administrasi berarti membagikan pelayanan. Dari kedua penafsiran tersebut bisa disimpulkan, administrasi merupakan pelayanan aktivitas tata usaha kantor (pelayanan pengetikan/ pc, pelayanan surat- menyurat, serta sebagainya).

Menurut Alexander (1994), pembangunan (*development*) merupakan proses pergantian yang mencakup segala sistem sosial, semacam infrastruktur, kelembagaan, politik, pertahanan, pendidikan dan teknologi, ekonomi, dan budaya. Portes (1976) mengartikan pembangunan selaku transformasi sosial, budaya serta ekonomi. Pembangunan merupakan proses pergantian yang direncanakan buat membetulkan bermacam aspek kehidupan warga. Kemudian menurut Ginanjar Kartasasmita (1994) membagikan penafsiran yang lebih simpel, pembangunan adalah proses pergantian ke arah yang lebih baik lewat upaya yang dilaksanakan dengan terencana. (Anggara S dan Sumatri I, 2016: 18-19)

Menurut Fakih (2001:10) Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan merupakan kata benda netral yang artinya merupakan sesuatu kata yang digunakan untuk menarangkan proses serta usaha yang tingkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur warga serta sebagainya.

Kemudian menurut Galtung (dalam Trijono, 2007:3) Pembangunan ialah upaya individu dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan dassar manusia yang berprinsip kedepan dengan cara yang baik yang tidak menimbulkan kekacauan baik pada kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

Sebaliknya bagi Katz (di Yuwono, 2001:47) mengemukakan bahwa pembangunan akan dipandang lebih baik jika suatu kondisi pembangungan yang besar dan bernilai. Pada dasarnya tfungsi dan tujuan pembangunan ini tidak lain untuk pembinaan bangsa (national building)

serta perkembangan sosial ekonomi. Sehingga dalam menggapai pembangunan yang sudah direncanakan semasa ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah diharapkan bersama bahwa kenaikan kesejahteraan manusia jadi fokus sentral pada pembangunan dimana penerapan pembangunan masyarakatlah yang memastikan tujuan, sumber- sumber pengawasan serta pengarahan proses- proses penerapan pembangunan.

Pengertian pembangunan menurut Effendi (2002:2) merupakan "suatu usaha yang dilakukan dalam peningkatan segenap sumber daya yang dilaksanakan secara terencana dan memounyai tujuan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan". Informasi dan pendidikan dalam membangun suatu pembangunan merupakan pokok utama yang menjadi dasar bagi masyarakat yang berorientasi pada pembangunan masyarakat itu sendiri dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita- cita yang lebih baik.

B. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas

1. Pengertian Efektivitas

Secara umum, Pengertian efektivitas merupakan proses dimana tingkat keberhasilan atau penggapaian yang besar dari suatu tujuan atau arahan yang telah direncanakan terlebih dahulu dari suatu kondisi, yang telah dicapai melalui proses yang baik yang diukur dengan mutu, kuantitas, dan waktu yang tepat

Efektivitas adalah sesuatu tingkatan penggapaian suatu keberhasilah yang telah dihasilkan oleh individu maupun organisasi yang hendak dicapai dengan melakukan hal tertentu sesuai dengan tujuan atau rencana awal yang baik. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu aktivitas dianggap semakin efesien dan efektif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas atau daya guna merupakan energi guna, keaktifan, dan terdapatnya kesesuaian dalam sesuatu aktivitas.

Pendapat Beni (2016: 69) efektivitas merupakan ikatan antara pengeluran tujuan tujuan atau dapat dikatakan ialah dimensi seperapa tingkatan output, kebijakan serta prosedur dari organisasi.

Menurut Ravianto (2014:11), penafsiran efektivitas merupakan suatu pekerjaan tau kegiatan yang dilakukan yang sesuai dengan tujuan yang terlah direncanakan sebelumnya. Keberhasilan dapat diukur dari seberapa baik pekerjaan yang dilakukan,yang sesuai denga apa yang diharapkan sebelumnya. Hal ini dapat diartikan sebagai sejauh mana kita berhasil menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan baik sesuai dengan jadwal, perencanaan, besarnya biaya, mutunya arntinya sudah dapat disebut efesien dan efektif.

Penafsiran efektivitas menurut Gibson (Bungkaes 2013:46), merupakan evaluasi dari suatu kegiatan yang dilakukan yang terbuat berkaitan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi**.** Hal ini meunjukkan bahwa apabila pencapaian tercapai sesuai dengan prestasi yang diharapkan (standar), maka artinya dapat dinilai menjadi efektif.

2. Aspek- Aspek Efektivitas

Ada aspek- aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. pada pengertian efektivitas di atas, berikut adalah beberapa aspek tersebut Menurut Muasaroh (2010), efektivitas merupakan suatu program yang bisa dilihat dari bermacam aspek, antara lain :

a. Aspek Peraturan/ Ketentuan

Peraturan dibuat untuk melindungi kelangsungan sesuatu aktivitas berjalan cocok dengan rencana. Peraturan ataupun syarat ialah suatu yang wajib dilaksanakan supaya sesuatu aktivitas dikira telah berjalan secara efisien.

b. Aspek Fungsi/ Tugas

Individu ataupun organisasi bisa dikira efisien bila bisa melaksanakan tugas serta gunanya dengan baik cocok dengan syarat. Oleh sebab itu tiap orang dalam organisasi wajib mengenali tugas serta gunanya sehingga bisa melaksanaannya..

c. Aspek Rencana/ Program

Suatu aktivitas bisa dinilai efisien bila mempunyai sesuatu rencana yang hendak dilakukan agar menggapai tujuan yang mau dicapai. Tanpa terdapatnya rencana ataupun program, hingga tujuan tidak bisa jadi bisa tercapai.

d. Aspek Tujuan/ Kondisi Ideal

Yang diartikan dengan keadaan sempurna ataupun tujuan merupakan sasaran yang mau dicapai dari sesuatu aktivitas dengan berorientasi pada hasil serta proses yang direncanakan.

C. Konsep dan Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Herujito (2006:242) pengertian pengawasan (controlling) selaku elemen ataupun guna keempat manajemen yakni mengamati serta mengalokasikan dengan pas penyimpangan- penyimpangan yang terjalin. Dalam praktek kita amati, kegagalan sesuatu rencana ataupun kegiatan bersumber pada 2 perihal, ialah:

a. Akibat pengaruh di luar jangkauan manusia (force major).
b. Pelaku yang mengerjakannya tidak memenuhi persyaratan yang diminta.

Kemudian menurut Terry dan Leslie (2005: 238) Pengawasan merupakan proses mengevaluasikan penerapan kerja dengan menyamakan penerapan aktual dengan apa yang diharapkan (goal and objectives) dan mengambil aksi yang dibutuhkan.

Sedangkan menurut Siagian (2005: 125) Pengawasan selaku salah satu guna organik manajemen ialah proses pengamatan dari segala aktivitas organisasi guna lebih menjamin jika seluruh pekerjaan yang lagi dikerjakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan lebih dahulu. Selaku guna organik, pengawasan ialah salah satu tugas absolut diselenggarakan oleh seluruh orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak sampai para manajer rendah yang secara langsung mengatur kegiatan- aktivitas teknis yang diselenggarakan oleh seluruh petugas operasional.

Menurut Bohari (2002: 3) penafsiran pengawasan yang sesungguhnya yaitu suatu upaya agar apa yang sudah direncanakan

lebih dahulu diwujudkan dalam waktu yang sudah ditantukan dan buat mengenali kelemahan- kelemahan serta kesulitan- kesulitan dalam penerapan tadi, sehingga bersumber pada pengamatan- pengamatan tersebut bisa diambil sesuatu aksi buat memperbaikinya, demi tercapainya bentuk semula.

Menurut Schermerhorn (dibuku Sule dan Saefullah, 2005: 317) mengartikan bahwa pengawasan yakni selaku proses untuk menetapkan dimensi kinerja serta pengambilan aksiatau tindakan yang menunjang pencapaian suatu hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang sudah diresmikan tersebut.

Definisi tersebut se jalan dengan pengertian pengawasan menurut Stoner (dibuku Sule dan Saefullah, 2005: 317) yang mengemukakan bahwa pengawasan ialah suatu kegiatan untuk memastikan bahwa segala aktifitas telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Semntara menurut Mockler (dibuku Sule dan Saefullah, 2005: 317) secara lengkap mengemukakan bahwa pada intinya pengawasan tidak hanya bertujuan untun mengamati apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai ataupun tidak berjalan dengan baik, namun juga termasuk dengan kegiatan atau aksi koraksi yang bisa jadi dibutuhkan sanggup menentukan dan menyesuaikan standat yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.

Setelah itu Koontz serta O’ Donnell (didalam buku Silalahi, 2005: 5) Pengawasan merupakan pengukuran serta revisi kegiatan- kegiatan bawahan buat menjamin kalau kejadian- kejadian sudah sesuai dengan rencana.

Lebih lanjut mengenai teori konsep pengawasan, Wursanto (2002: 270) menyatakan bahwa, pengawasan atau controlling bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya. Organisasi akan mencapai sasarannya apabila pimpinan mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik- baiknya.

Sementara menurut Simbolon (2004: 61) pengawasan merupakan sebuah proses dimana penerapan kegiatan atau tugas yang dilakukan oleh bawahan atau pekerja itu pas dan selaras dengan rencana, tujuan, perintah, kebijakan yang sudah ditentekan oleh pimpinan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut :

a. Rencana (planning) yang harus ditentukan.
b. Perintah (orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance).
c. Tujuan.
d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan serangkaian proses penilaian terhadap penerapan pekerjaan yang sudah dicoba, guna menjamin seluruh pekerjaan yang lagi berjalan dengan apa yang diharapkan/ direncanakan. Dengan terdapatnya pengawasan, kesalahan- kesalahan yang sudah terjalin diharapkan bisa diperbaiki serta tidak terulang dikemudian hari.

Pengawasan ataupun control memiliki perananan ataupun peran yang berarti sekali dalam manajemen, mengingat memiliki guna buat menguji apakah penerapan kerja tertib tertib, terencana ataupun tidak. Meski planning, organizing, actuating baik, namun apabila penerapan kerja tidak tertib, tertib serta terencana, hingga tujuan yang sudah diresmikan tidak hendak tercapai.

Dengan demikian control memiliki guna buat mengawasi seluruh aktivitas supaya tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang sudah diresmikan bisa tercapai.

Pengawasan bisa diformulasikan selaku proses penentuan apa yang wajib dicapai ialah standard, apa yang lagi dicoba ialah penerapan, memperhitungkan penerapan, serta bilaman butuh melaksanakan perbaikan- perbaikan, sehingga penerapan cocok dengan rencana, ialah selaras dengan standard ataupun dimensi. Terry (Sukarna, 2011: 116)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan pengawasan berasal dari kata ‘awas’ yang berarti mengamati dan menjaga baik - baik. Maka secara harfiah pengawasan mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh- sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 19 tahun 1996 menyebutkan pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan atau kegiatan tertentu

dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Sementara Winardi (2006) mengemukakan bahwa pengawasan ialah mendeterminasi yang sudah dilakukan, yang artinya menilai suatu keberhasilan kegiatan dan melakukan aksi- aksi yang korektif sehingga evaluasi kegiatan tersebut berlajan sesuai yang diharapkan sebelumnya. Sedangkan Brantas (2009) mengartikan bahwa pengawasan merupakan proses mengamati mengevaluasi, serta penilaian dan pendokumentasian rencana terhadap penggapaian tujuan yang sudah diharapkan dan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Menurut Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) yang mengatakan bahwa: Pada pokoknya *controlling* atau pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma? norma, standar atau rencana? rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Didalam Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2009 yang dimaksud dengan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian lpg meliputi :

a. Pelaksanaan izin usaha.
b. Standar dan mutu (spesifikasi) LPG.
c. Prioritas (alokasi) pemanfaatan LPG dalam negeri.

d. Kelangsungan penyediaan dan pendistribusian gas lpg.
e. Harga jual lpg pada tingkat yang wajar.
f. Penerapan kaidah keteknikan yang baik.
g. Keselamatan minyak dan gas bumi, yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi.
h. Pengelolaan lingkungan hidup.
i. Pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat.
j. Menjamin peningkatan pelayanan kepada pelanggan.
k. Terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kadarman (2001: 159) pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Pengawasan terdapat tiga unsur pokok atau langkah dalam proses pengawasan yaitu:

a. Menetapkan standar

Kegaiatan pengawasan adalah mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari pada pejabat atau pekerja, untuk dapat melakukan pengukuran harus mempunyai alat pengukur (standar), alat pengukur yang dimaksud adalah waktu, jumlah, dan

harga. Standar itu adalah mutlak diperlukan, yaitu untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditentukan (standar) atau tidak.

b. Mengukur kinerja

Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar-standar yang telah ditentukan. Adapun pelaksanaan pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan melakukan observasi/inspeksi.

c. Memperbaiki penyimpangan

Dimaksudkan untuk mengetahui ada/ tidaknya penyimpangan - penyimpangan (deviasi). Penyimpangan- penyimpangan dianalisa umtuk mengetahui mengapa standar tidak dapat dicapai dan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.

Terry (Sukarna, 2011: 116), mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

a. *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan)
b. *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan)
c. *Comparing performance with the standard and ascerting the difference, it any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan)
d. *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).

2. Jenis Pengawasan

Berdasarkan lampiran I KMA/080/VIII/2006 ada beberaqpa jenis pengawasan adalah:

a. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.
b. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang--undangan yang berlaku.
c. Pengawasan Rutin / Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3. Prinsip Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip- prinsip:

a. Independensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan lembaga peradilan, tanpa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lainnya.
b. Objektivitas, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang

antara lain adalah : hukum acara, peraturan perundang-undangan yang terkait, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung, kode etik dan Code of Conduct hakim.

c. Kompetensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang ditunjuk untuk itu dengan wewenang, pertanggungjawaban, dan uraian tugas yang jelas.
d. Formalistik, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan.
e. Koordinasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya Over-Lapping.
f. Integrasi dan Sinkronisasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam melakukan pengawasan
g. Efisien, Efektif dan Ekonomis dalam pengertian bahwa pengawasan harus dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat secara maksimal.

D. Konsep Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Saluran Distribusi merupakan sesuatu proses penyampaian benda ataupun jasa dari produsen ke konsumen serta para pemakai, sewaktu serta dimana benda ataupun jasa tersebut dibutuhkan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menghasilkan faedah(utility) waktu, tempat, serta pengalihan hak kepunyaan. (Octana dan Lita, 2013 : 2)

Bagi Winardi yang diartikan dengan saluran distribusi merupakan selaku berikut:“ Saluran distribusi ialah sesuatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain serta yang menyalurkan bahan- bahan kepada pembeli.” Sebaliknya Kotler mengemukakan kalau:“ Saluran distribusi merupakan serangkaian organisasi yang silih bergantung serta ikut serta dalam proses buat menjadikan sesuatu benda ataupun jasa siap buat digunakan ataupun disantap.” Distribusi ialah perantara yang menjembatani antara produsen serta konsumen. Ada sebagian jenis saluran yang bisa digunakan bisa digunakan dalam pendistribusian benda. (Boyd, herper w, dan kawan-kawan 2000 :12)

Menurut Warren J. Keegan “Saluran Distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri”. Menurut Assauri “ Saluran distribusi merupakan lembaga-lembaga yang memasarkanya, yang berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen”. Distribusi pertama adalah suatu saluran yang dipergunakan untuk dilewati oleh arus pemilikan (*flow of title*) atas barang atau jasa yang diperjual-belikan. Kedua saluran distribusi adalah suatu gabungan lembaga sebagai tempat yang dilalui oleh penjual dalam proses pemilikan ketika penjual itu menjajaki barang-barangnya hingga tiba ditangan pemakai atau konsumen akhir. Perusahaan dalam pemilihan saluran distribusi perlu mencari yang paling efektif untuk dapat membina dan mendekati para pembeli, sehingga produk-produk dapat sampai kekonsumen dengan efektif pula. (Muin dan Rahmawati, 2013)

Distribusi ialah aspek yang tidak bisa dipisahkan dari sistem ekonomi modern, sebab dengan distribusi yang baik tersebut bisa terbentuk keadilan sosial dalam bidang ekonomi, dari proses inilah seluruh kebutuhan warga bisa terpenuhi, hendak namun pada proses ini pula banyak terjalin penyalahgunaan wewenang serta sebagainya sehingga aspek ekonomi tersebut tidak menyeluruh ataupun pas sasaran (Lupiyoadi, 2001 : 159)

Dari penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan kalau distribusi ialah proses penyaluran hasil penciptaan berbentuk benda serta jasa dari produsen ke konsumen guna penuhi kebutuhan manusia, baik primer ataupun sekunder.

Menurut Evans dan Berman, (1994) dalam David, (2009 :153- 155) ada 3 macam cakupan distribusi yaitu sebagai berikut:

a. Distribusi eksklusif: yaitu *marketer* hanya menunjuk saru orang atau distributor khusus untuk menyalurkan produknya di daerah tertentu.
b. Distribusi selektif: yaitu memasarkan produk perusahaan di beberapa gerai ritel saja dalam suatu daerah pemasaran tertentu.
c. Distribusi intensif: yaitu produsen berusaha mendistribuskan produknya di semua gerai ritel yang mungkin menjualnya.

2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dilakukan oleh badan usaha atau perorangan sejak pengumpulan barang dengan jalan membelinya dari produsen untuk disalurkan ke konsumen, berdasarkan hal tersebut maka fungsi distribusi terbagi atas:

a. Fungsi pertukaran, dimana kegiatan pemasaran atau jual beli barang atau jasa yang meliputi pembelian, penjualan, dan pengambilan resiko (untuk mengatasi resiko bisa dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi pergudangan yang baik, mengasuransikan barang dagangan yang akan dan sedang dilakukan).
b. Fungsi penyediaan fisik, berkaitan dengan menyediakan barang dagangan dalam jumlah yang tepat mencakup masalah pengumpulan, penyimpanan, pemilahan, dan pengangkutan.
c. Fungsi penunjang, ini merupakan fungsi yang berkaitan dengan upaya memberikan fasilitas kepada fungsi-fungsi lain agar kegiatan distribusi dapat berjalan dengan lancar, fungsi ini meliputi pelayanan, pembelanjaan, penyebaran informasi, dan koordinasi.

3. Tujuan Distribusi

Sebagaimana produksi dan konsumsi, distribusi juga mempunyai tujuan. Di antara tujuan tersebut yaitu:

a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian. Manusia harus terus berusaha untuk mempertahankan kehidupanya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primernya sebatas yang dibutuhkan dan tidak berlebihan. Mereka juga harus mendistribusikan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan ini.

b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolak antara yang kaya dengan yang miskin akan mengakibatkan sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sifat permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Meskipun demikian, Islam mengakui adanya perbedaan jumlah harta antar individu dalam masyarakat.
c. Untuk menyucikan jiwa dan harta dalam segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Kotoran berupa sifat kikir, tamak, rakus, boros, dan sebagainya. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat yang negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia.
d. Membangun generasi yang unggul karna generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa..
e. Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi.
f. Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.

4. Macam-Macam Distribusi

a. Distribusi Langsung (jangka panjang)

Sistem distribusi atau kegiatan menyalurkan barang yang tidak menggunakan saluran distribusi. Jadi, produsen langsung berhubungan dengan pembeli atau konsumen.

b. Distribusi Semi Langsung

Penyampaian barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara tetapi perantara masih milik produsen sendiri. Menjual barang hasil produksinya melalui toko milik produsen sendiri.

c. Distribusi Tidak Langsung

Kegiatan menyalurkan barang dan jasa melalui pihak-pihak lain atau badan perantara seperti agen, makelar, toko atau pedagang eceran.

E. LPG (Liquefied Petroleum Gas)

1. Definisi LPG (Liquefied Petroleum Gas)

Liquefied Petroleum Gas atau biasa dikatakan dengan LPG ialah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan dengan mempermudah pengangkutan serta penyimpanan, penanganannya yang pada dasarnya terdiri dari propana, butane, ataupun camuran keduanya.(Peraturan Menteri energy Nomor. 26 Tahun 2009 tentang penyediaan serta pendistribusian Liquefied Petroleum Gas).

Penafsiran lain, LPG ialah bahan bakar berwujud gas yang dicairkan (Liquified Petroleum Gass) merupakan hasil minyak bumi yang didapatkan melalui metode distilasi bertekanan besar. Bahan utama LPG terbuat dari bahan Hidrokarbon rendah berbentuk Propana (C3H8) serta Butana (C4H10), beserta sedikit Etana (C2H6) serta Pentana (C5H12). (Willian Dunn, 1998: 24)

LPG juga digunakan sebagai bahan bakar buat rumah tangga serta industri, terlebih warga tingkatan menengah keatas yang keperluannya terus meningkat dari tahun ketahun karena terkategori bahan bakar ramah area. Selaku bahan bakar buat keperluan rumah tangga, hingga LPG sanggup berikan sebagian persyaratan tertentu dengan iktikad supaya nyaman digunakan dalam makna tidak beresiko untuk pengguna

serta tidak merugikan perlengkapan yang dipakai dan efektif dalam penggunaannya. (Jurnal Ariansyah, 2014).

Pemerintah Kota Jambi punya terobosan baru guna mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan peredaran Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 Kg. Dengan menerapkan penggunaan kartu pelanggan LPG 3 kg, Pemkot Jambi bisa mendistribusikan LPG subsidi kepada masyarakat yang berhak sesuai aturan regulasi.

Menurut Walikota Jambi Syarif Fasha, penggunaan kartu pelanggan LPG 3 Kg tersebut mampu mengatasi berbagai persoalan yang sering muncul, seperti harga LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi (HET) maupun terjadinya kelangkaan pasokan LPG 3 Kg yang diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. “Kartu ini menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat,” ungkap Walikota Jambi Syarif Fasha.

Menurut Agung Pribadi, kebijakan Pemkot Jambi menggambarkan adanya optimalisasi peran dan kerja sinergis antar instasi terkait dalam pengawasan distribusi LPG 3 Kg.. Langkah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Pasal 22 ayat (4), di mana pelaksanaan pengawasan dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bekerja sama dengan instansi terkait.

Sebagai komoditas penting dan menjadi salah satu prioritas utama pemenuhan kebutuhan domestik, LPG 3 Kg telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan

Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Inovasi Pemerintah Kota Jambi yang menggunakan kartu langganan bagi masyarakat untuk mendapatkan gas tiga kilogram bersubsidi di pangkalan menjadi percontohan nasional. Sudah satu tahun Pemerintah Kota Jambi melakukan uji coba penggunaan kartu langganan gas tiga kilogram bersubsidi tersebut. Meski masih terdapat kendala dan evaluasi, namun penggunaan kartu langganan tersebut terbukti dapat mengatasi permasalahan yang kerap muncul. Tidak lagi terjadi kelangkaan gas tiga kilogram di tengahmasyarakat. Masyarakat tidak lagi antre untuk membeli gas, karena gas tersedia untuk masyarakat yang memiliki kartu langganan.

Dengan Inovasi tersebut, beberapa waktu lalu Wali Kota Jambi Syarif Fasha diminta untuk menjadi narasumber oleh Kementerian ESDM di depan bupati dan wali kota se-Indonesia terkait penerapan kartu langganan gas tiga kilogram bersubsidi tersebut.

Menurut Pertamina dalam Bukunya “Catatan Operasional dan Produk Non BBM”, untuk produk LPG ada 3 macam yaitu sebagai berikut:

a. LPG Pronane, pada umumnya terdiri dari C3 yang biasanya di gunakan pada indistri-industri sebagai pendingin, bahan bakar pemotong, untuk menyemprot cat dan lainnya.
b. LPG Butane, pada umumnya terdiri dari C4 biasa digunakan oleh masyarakat untuk bahan bakar memasak, korek api dan lainnya.
c. Mix LPG, yaitu campuran dari propane dan butane seringkali digunakan oleh masyarakat sebagai bahan bakar minyak.

Tabel. 3

Jenis LPG Menurut Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2009

tentang Penyediaandan Pendistribusian LPG

NO	JENIS	KETERANGAN	CONTOH
1	LPG Tertentu	LPG ini merupakan bahan bakar yang memiliki kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengunaan, kemasan, volume dan harganya yang masih diberi subsidi	3kg
2	LPG Umum	LPG yang merupakan bahan bakar pengguna, kemasan, volume serta harganya yang tidak di berikan subsidi	12 kg, 50 kg dan bulk

Sumber : Pertamina dalam buku (Catatan Operasional dan Produk Non BBM)

Sifat produk LPG tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tidak berwarna, untuk dapat melihat fluida maka perlu di tambahkan zat berwarna.
b. Tidak berbau, untuk menjamin faktor keselamatan diberi zat odor, sehingga ketika terjadi kebocoran maka akan tercium.
c. Tidak berasa
d. Tidak/sedikit beracun, apabila terjadi kebocoran diruang tertutup, dapat menggantikan oksigen diruangan tersebut dan akan mengakibatkan gangguan saluran pernapasan (sesak napas) pada orang yang ada dalam ruangan.
e. Mudah terbakar, secara umum bahwa persyaratan mutu LPG adalah LPG harus dapat menguap dan terbakar dengan baik pada saat penggunaan tanpa menyebabkan korosi atau meninggalkan depositdi dalam sistem.

2. Penyediaan LPG 3 Kg

Menurut Peraturan Presiden No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg Penyediaan Gas Lpg 3Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Penyediaan atas kebutuhan tahunan Gas Lpg 3 Kg dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan oleh Menteri. Badan usaha yang mendapat penugasan penyediaanGas Lpg 3 Kg bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan dan penyaluran Gas Lpg 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

3. Sasaran Distribusi LPG 3 Kg

Sasaran pendistribusian tabung LPG 3 Kilogram Sesuai dengan Perpres Nomor 104 ditahun 2007 mengenai Pengadaan atau penyediaan, distribusi, dan ketetapan Harga LPG gas 3 kilogram maka penerima paket gas LPG 3 Kg adalah :

a. Rumah Tangga.

   Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

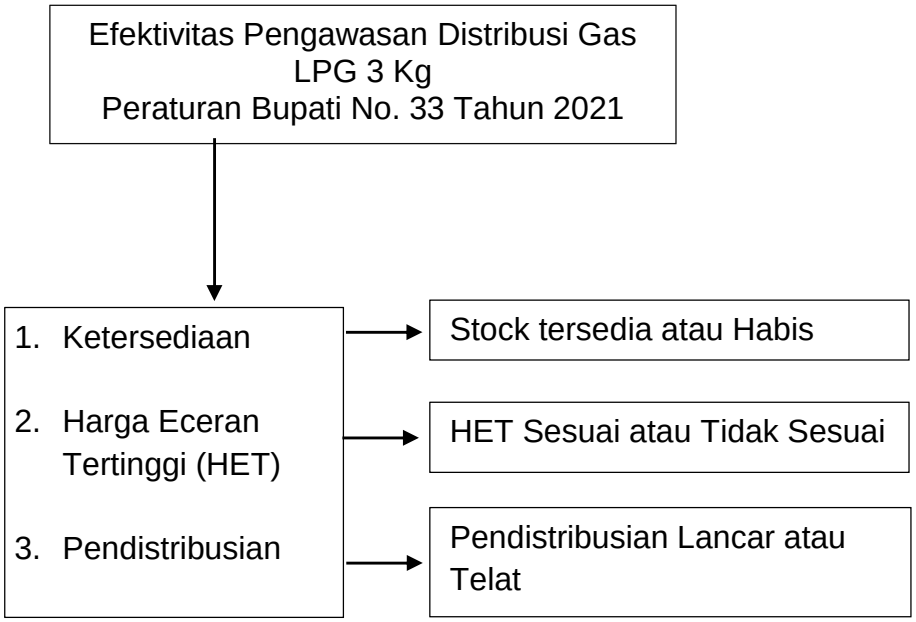
   1) Ibu rumah tangga
   2) Pengguna minyak tanah murni
   3) Kelas social C1 kebawah (pengeluaran<1,5 juta/bulan)
   4) Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.

b. Usaha Mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

1) Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya.
2) Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.
3) Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

F. Kerangka Tesis Karya

Kerangka tesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

1. Indikator Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan, berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan itu dilakukan.

Menurut Gibson et,al (2012 : 15) ada indikator- indikator pengukuran efektivitas 3 dengan menggunakan tiga pendekatan dari efektifitas yaitu:

a. Pendekatan tujuan

   Pendekatan tujuan merupakan pendekatan yang banyak digunakan oleh organisasi. Pendekatan ini menekankan organisasi ada untuk mencapai tujuan organisasi. Keefektifan organisasi dapat ditunjukkan dari tingkat prestasi organisasi. Dengan begitu evaluasi baik itu dari individu maupun kelompok organisasi harus terus dilakukan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.

b. Pendekatan sistem

   Dalam pendekatan sistem terdapat salah satu unsur dari sejumlah elemen yang saling berinteraksi dalam suatu organisasi. Pendekatan sistem memandang bahwa suatu sistem secara keseluruhan memiliki beberapa sub- sub sistem yang saling terikat satu dengan yang lainnya. Dimana sistem memiliki empat elemen dasar yaitu elemen input, proses, output, dan lingkungan. Input atau masukan merupakan segala sumber daya yang digunakan dalam organisasi untuk mendukung proses dalam upaya menghasilkan keluaran yang diharapkan. Proses merupakan kegiatan untuk mengolah input menjadi output yang mana pengertian output adalah hasil dari pengolaha input dan proses.

c. Pendekatan dari pemangku kepentingan (stakeholder)

Pendekatan ini mensinergikan antara pendekatan tujuan dengan pendekatan sistem. Dalam pendekatan ini penting untuk mencapai keseimbangan antara berbagai bagian dari sistem dengan memuaskan kepentingan kostituen organisasi (individu dan kelompok individu yang memiliki kepentingan dalam organisasi).

2. Indikator Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Situmorang (1994:14) pengawasan adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang tujuannya agar tercapainya kebijakan yang telah dibuat. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ini merupakan salah satu dari fungsi manajemen pemerintah guna menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Indikator Pengawasan Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016: 290) terdiri dari empat indikator yaitu :

a. Menetapkan standar (Standards) yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.

b. Pengukuran (Measurement) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
c. Membandingkan (Compare) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
d. Melakukan tindakan (Action) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

3. Indikator Distribusi

Distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen.

Distribusi ialah penyaluran yang alirkan oleh produk maupun jasa dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai ke tangan konsumen maupun pelanggan (Arifin, Mutinda Teguh, 2017: 11).

Distribusi ialah berbagai aktivasi yang berusaha mempermudah penyaimpan, penyerahan, atau penyaluran barang dan jasa dari produsen, sehingga sesuai dengan apa diperlukannya (Rizki Eka Prasetyo, Nawangsih, 2018: 558).

Indikator yang dapat diukur dalam distribusi yaitu (Heru Sucianto Tjia, Suharno, 2018: 94) yaitu:

a. Ketersedian barang

b. Produk pemesanan
c. Kecepatan dalam pengiriman
d. Kemudahan dalam memperoleh produk

Adapun indikator- indikator distribusi menurut Philip Kotler (2009) adalah

a. Saluran pemasaran
b. Cakupan Pemasaran / Jumlah Gerai
c. Lokasi / Mudah dijangkau
d. Persediaan / Kelengkapan Produk
e. Transportai